

HUBUNGAN ANTARA CALON LEGISLATIF DENGAN PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2019

MOHAMMAD AL IHSAN
NPM : 20112074

ABSTRACT

This study aims to (1) find out and examine how regional legislative candidates in the 2019 simultaneous election campaign are bound to the policies of the political party coalition in the President's choice. (2) To analyze the sanctions for legislative candidates or the nomination of political parties in the regions in campaigning if they are different from the party coalition.

The research method used is normative legal research that is descriptive analytical and the source of the data obtained is through legal materials as primary data, secondary data from books, laws and regulations and others. This study uses qualitative data analysis.

The results of the study show that the Jokowi-Maruf Coalition is ineffective and has not fully implemented the policy line from the central party to parties in the regions, because the candidates for legislative members in the coalition still distinguish between the presidential and legislative elections. Likewise, the leaders of political parties who are still counting on this coalition that are very profitable are the PDI party. With this, members of the legislative candidates are not tied to the coalition of parties that carry Jokowi-Maruf. Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Coalition. Very active in carrying out policies from the central party and parties in the regions who in coalition are very active in campaigning to win Prabowo Subianto-Sandiaga uno, in the 2019 simultaneous elections. Because of this coalition, members of legislative candidates campaign according to the orders of the party that carries Prabowo Subianto-Sandiaga uno . in the Prabowo Subianto-Sandiaga Uno coalition. Candidates for members of the legislature, whose party carries Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. very tied to the policy line of the central party and the line of party policy in the regions, after the election ended there was no sanction from the Prabowo Subianto-Sandiaga uno coalition party. given to candidates for legislative members in the 2019 simultaneous elections.

Keywords: Legislative, Political Parties and 2019 General Election

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berusaha untuk membangun sistem politik demokrasi sejak menyatakan

kemerdekaan dan kedaulatannya pada tahun 1945. Sebuah gagasan, demokrasi sebenarnya sudah banyak dibahas atau bahkan dicoba diterapkan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik, menyebutkan bahwa Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), keberadaannya sangat dilindungi konstitusi dalam negara demokrasi konstitusional.

Sistem presidensial, presiden tetap memerlukan dukungan dari legislatif. Tanpa dukungan itu Presiden akan menghadapi situasi sulit yang mengancam stabilitas pemerintahan. Hanya saja dukungan legislatif sulit didapatkan jika sistem presidensial di bangun dalam sistem multipartai. Selain itu, presiden juga membutuhkan koalisi bila partai pendukung presiden bukanlah partai mayoritas di lembaga perwakilan. Langkah itu dilakukan agar presiden mendapat dukungan mayoritas di lembaga perwakilan. Sulitnya membentuk koalisi seperti dikatakan Mainwaring tersebut akan bertambah sulit bila sistem kepartaian yang diterapkan adalah multipartai (Fahmi, 2016:1).

Sistem multipartai yang diterapkan saat ini tidak mampu

menghasilkan lembaga legislatif yang solid karena perolehan kursi di DPR terdistribusi oleh banyak Partai dengan kepentingan politik dan ideologi yang berbeda-beda. Akhirnya, karena Presiden (dan parpol pendukungnya) tidak mampu memperoleh kursi mayoritas di DPR sehingga presiden yang mendapat mandat langsung dari rakyat melebihi perolehan suara politik ini terpaksa untuk menempuh koalisi besar Partai politik di parlemen guna mengamankan kebijakan-kebijakannya (Kuswanto, 2016:1). Pemilu 2019 menggunakan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Regulasi ini di dalamnya mengatur persyaratan Partai politik menjadi peserta pemilu, seperti halnya telah lulus verifikasi dan memenuhi persyaratan badan hukum, memiliki kepengurusan dari level pusat sampai daerah, memiliki keanggotaan, dan lain sebagainya. Sehingga, Pemilu Presiden 2019 menjadi istimewa selain karena diikuti oleh kandidat yang telah bertarung pada pemilu sebelumnya, juga dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Untuk kali pertamanya dalam sejarah pemilu di Indonesia, akan digelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama.

Pemilu 2019 nanti dikenal juga dengan sebutan “Pemilu Lima Kotak” Karena pada saat yang sama dilakukan pemilihan Presiden, pemilihan DPR-RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten/Kota dan pemilihan DPD. Dari sisi kontestasi, nuansa kompetisi pasangan calon diperkirakan akan kuat karena adanya pengaruh antara politik lokal di pilkada serentak 2018 dengan preferensi politik publik di tingkat nasional. Studi yang dilakukan CSIS (2018) menunjukkan ada pengaruh antara psikologi pemilih di tingkat lokal dalam pelaksanaan pilkada tahun 2018 dengan psikologi pemilih di tingkat pusat menjelang pemilu nasional serentak

2019.

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintah. Secara *de facto* Pemilu di Indonesia, Partai politik mempunyai peran sentral dalam proses tersebut. Partai inilah yang berperan memberikan kandidat pejabat politik. Hal ini memang merupakan salah satu fungsi Partai politik untuk menyiapkan para calon kadernya, Peran sentral Partai politik ini kemudian akan menjadikan Partai politik sebagai kendaraan utama untuk mendapatkan sebuah jabatan politik.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah calon legislatif di daerah dalam kampanye pemilu serentak 2019 terikat pada kebijakan koalisi partai politik dalam pilihan presiden, (2) Adakah sanksi bagi calon legislatif atau pengusulan partai politik di daerah dalam berkampanye jika berbeda dengan koalisi partainya. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana calon legislatif di daerah dalam kampanye pemilu serentak 2019 terikat pada kebijakan koalisi partai politik dalam pilihan Presiden (2) untuk menganalisis sanksi bagi calon legislatif atau pengusulan partai politik di daerah dalam berkampanye jika berbeda dengan koalisi partainya.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (H. Zainuddin Ali, 2017:12).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan dan menganalisis dengan maksud untuk mengambil suatu kesimpulan.

3. Bahan Penelitian

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang diperoleh terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum pada tesis ini adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan studi yang terkait dengan isu hukum. Penulis mempelajari buku- buku hukum, undang-undang yang terkait dengan isu hukum, artikel dan jurnal- jurnal hukum yang terkait dengan isu hukum yang penulis angkat.

5. Metode Analisis Data

Analisis data disini dimaksudkan sebagai cara untuk memilah-milah, mengelompokkan, dan mengkalisifikasi data agar kemudian dapat ditetapkan kategori-kategori tertentu sehingga data tersebut memiliki makna. Sehingga untuk mempermudah menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti, selain itu di dukung dengan wawancara kepada pengurus partai dan calon legislatif yang relevan dengan objek penelitian di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Calon legislatif di Kota Baubau

Reformasi dibidang pemerintahan daerah salah satunya adalah tuntutan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu sendiri, terutama optimalisasi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut (DPRD), jika dilihat dalam hukum tertinggi (konstitusi) Negara Indonesia menganut paham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Partai politik adalah merupakan salah satu wadah yang dibangun oleh masyarakat untuk kemajuan dalam berbangsa dan bernegara, pikiran-pikiran, pandangan, dan keyakinan dieksplorasikan bebas dalam masyarakat demokratis. Disamping partai politik, bentuk ekspresi lainnya terjelma juga dalam wujud kebebasan pers, kebebasan berkumpul, ataupun kebebasan berserikat melalui organisasi-organisasi non-partai politik seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi non pemerintah(NGO's), dan lain sebagainya.

Partai politik juga merupakan elemen bangsa yang sangat efektif dalam memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat, kerana partai politik merupakan jembatan yang dekat dengan pemerintah. Para wakil-wakil politik

yang mewakili rakyat di legislatif seharusnya terlebih dahulu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, bukan justru terlebih dahulu memperjuangkan aspirasi-aspirasi dan kepentingan-kepentingan individu, kelompok partai ataupun kepentingan-kepentingan penguasa. Permasalahan terakhir telah banyak terjadi, tidak hanya pada lembaga legislatif pusat bahkan juga telah menyebar pada lembaga legislatif di daerah-daerah.

Adapun Anggota DPRD Kota Baubau dilantik, Posisi Ketua Beralih dari PAN ke Golkar. Sebanyak 25 anggota DPRD Kota Baubau periode 2019-2024, Senin (01/10/2019) diambil sumpahnya di gedung DPRD Kota Baubau.

2. Koalisi Jokowi-Maruf Amin dalam Pemilu Serentak 2019

a. Partai PKB

Menurut Feto Daud, Pemilu serentak 2019 DPP PKB mendukung penuh calon pilpres 01 karena yang diusung adalah pendiri partai PKB sebagai calon Wakil Presiden KH. Mar'uf amin. bagi DPP PKB tidak ada tawar menawar soal dukungan, wajib hukumnya untuk seluruh pengurus mendukung dan memenangkan calon pilpres Joko widodo-KH. Maruf amin. Kebijakan DPP PKB dijalankan sampai tingkat PAC PKB mulai dari Kabupaten/Kota hingga Kota Baubau. Pemilu serentak 2019. calon legislatif PKB di saat berkampanye mereka berkampanye diri mereka dan calon pilpres, sejauh ini kami dari PKB sangat aktif berkampanye Joko widodo-KH. Maruf amin. mulai dari kampanye non formal hingga formal. mulai DPW, DPC, PAC Kota Baubau. hampir setiap kelurahan kami melakukan pengajian bersama untuk mendoakan kemenangan Jokowi- Maaruf.

Pengajian ini bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemuda/pemudi disetiap kelurahan yang kami datangi satu bulan sebelum pemilihan kami konsisten untuk terus sosialisasi, berkampanye, sampai selesai pemilihan.

Pemilu serentak 2019. Untuk sejauh ini tidak ada laporan yang masuk terkait kader PKB berkampanye di pemilu 2019 dari partai lain, Semuanya berkampanye sesuai dengan perintah maupun kebijakan partai yang formal, maupun non formal (Konstitusi Partai). Jika ada yang terkafer, bahwa kader PKB keluar dari kebijakan DPP PKB maka akan diberi sanksi. Namun sejauh ini, tidak ada yang keluar dari kebijakan DPP PKB. Menurut Feto Daud, Pemilu serentak 2019 DPP PKB mendukung penuh calon pilpres 01 karena yang diusung adalah pendiri partai PKB sebagai calon Wakil Presiden KH. Maruf amin. bagi DPP PKB tidak ada tawar menawar soal dukungan, wajib hukumnya untuk seluruh pengurus mendukung dan memenangkan calon pilpres Joko widodo-KH. Maruf amin. garis kebijakan DPP PKB dijalankan sampai tingkat PAC PKB, mulai dari Kabupaten/Kota hingga Kota Baubau.

b. Partai Golkar

Menurut Zahari (Ketua DPD Parati Golkar Kota Baubau),. Pemilu serentak 2019 kebijakan DPP Golkar yang memiliki kewenangan untuk memenangkan Calon Presiden dan Wakil Presiden didaerah, ada pada badan pengendali dan pemenang pemilu di tingkat Provinsi maupun Kota Baubau. badan inilah yang kemudian menyusun kemenangan mulai dari pilpres

hingga pileg. Namun dalam momentum yang bersamaan Golkar juga bersaing dengan partai koalisi lain dalam rangka pileg. Dalam hal memenangkan pilpres kami juga melakukan distribusi personil disetiap Kabupaten/Kota beda hal dengan distribusi personil kemenangan di pileg. Personil yang kami maksud adalah para saksi disaat perhitungan suara di berbagai TPS. para saksi yang di distribusi sebanyak dua sampai tiga orang. Para saksi juga harus melakukan protes apabila terjadi penyimpangan atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena koalisi dalam pilpres, kami merasa dalam delematis sehingga kami punya strategi khusus untuk memenangkan pilpres 2019.

Menurut Zahari (Ketua DPD Parati Golkar Kota Baubau),.Pemilu serentak 2019 secara hierarki partai, kami dari partai Golkar DPD Kota Baubau wajib hukumnya untuk melaksanakan kebijakan dari DPP Pusat Partai Golkar untuk memenangkan pasangan Pilpres Ir. Joko widodo-KH. Hi, Maruf amin.

Hubungan para calon legislatif yang terpilih dan partai politik disaat momentum pemilu serentak ini sangat baik, terutama yang menjalankan garis kebijakan dari DPP Golkar. selain itu para calon legislatif dari partai Golkar memiliki basis tersendiri untuk momentum seperti ini. Kami dari partai Golkar DPD Kota Baubau. melakukan evaluasi sebelum kampanye dan sesudah kampanye. Namun besar harapan kami yaitu para calon legislatif terpilih dengan suara signifikan. Sejauh pemilu berjalan khususnya kader aktif yang berada di DPD Kota Baubau, tidak ada yang

keluar dari garis kebijakan. Jika ada kami akan memberi sanksi.

c. Partai Nasdem

Menurut Arifuddin (Ketua DPD Partai Nasdem Kota Baubau), DPP Partai Nasdem memberi dukungan kepada calon pilpres Jokowi-Maaruf. bukan hanya serta merta keputusan dari DPP. Namun pembahasan tersebut jauh sebelum pemilu diselenggarakan. DPP Pusat Mengundang seluruh DPW yang berada di Indonesia untuk memberi masukan di setiap daerah masing-masing, Kemudian dirangkum dari seluruh DPW yang berada di Indonesia kemudian DPP Partai Nasdem memutuskan dan memberi dukungan maupun partisipasi masyarakat di pemilu serentak 2019.

Pemilu serentak 2019. strategi kampanye dipegang oleh BAPILU Badan Pemenang Pemilu, yang ada di Kota Baubau maupun Kabupaten/Kota lainnya, kemudian model kampanye dari BAPILU tersebut di jalankan oleh kader-kader Partai yang sekaligus mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Namun fokus kami pada keduanya pileg maupun pilpres. kami partai Nasdem menghitung kecenderungan di masyarakat pada pilpres serentak 2019. kemarin sekaligus dengan para calon legislatif dari partai nasdem. Untuk mendapat dukungan penuh, Para caleg mengkampanyekan diri mereka sekaligus pasangan pilpres Jokowi- Maruf amin.

Hubungan caleg dan partai politik di pemilu serentak 2019 kemarin, Kami dari partai Nasdem mengapresiasi seluruh kader kami yang bekerja memenangkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Maruf amin. terlepas dari pilpres, calon legislatif dari partai Nasdem terpilih sebagai

Anggota DPRD Kota Baubau.

Kebijakan dari DPP Pusat turun ke daerah yaitu DPW dan DPD partai Nasdem menjalankan seluruh keputusan yang dibuat oleh DPP partai Nasdem. Namun khususnya Kota Baubau DPD Nasdem sangat maksimal dalam hal kampanye pilpres serentak 2019. Maksimal dalam artian bahwa kami bekerja seminggu lima kali kami melakukan pertemuan dari setiap kelurahan yang berada di Kota Baubau. Nasdem partaiku, Jokowi presidenku. Ini yang sering dibawa saat berkampanye dalam hal berkampanye tertentu, kami melihat kecenderungan masyarakat tertentu, jika basis atau pendukung Prabowo lebih banyak kami menyesuaikan dengan kondisi atau situasi masyarakat. pada kampanye pilpres 2019 kami dari Partai Nasdem mengkampanyekan Jokowi dengan program yang telah berhasil pak Jokowi jalankan selama periode lima tahun ini menjadi kampanye kami dari partai Nasdem yang turun disetiap kelurahan yang berada di Kota Baubau.

3. Koalisi Prabowo-Sandiaga uno dalam Pemilu Serentak 2019

a. Partai Demokrat

DPP partai Demokrat memberi dukungan kepada calon pilpres Prabowo subianto-Sandiaga uno. Karena suatu format konstitusi ataudiatur dalam AD/ART partai Demokrat. Kami dari partai koalisi di Sulawesi Tenggara maupun Kota Baubau. sangat aktif dalam Pemilu serentak 2019. Karena sesuai dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Kami dari DPD (Dewan Pimpinan Daerah dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang)

menjalankan seluruh kebijakan dari DPP partai Demokrat. Sehingga Prabowo-Sandi uno menang di Provinsi Sulawesi Tenggara. walaupun hasilnya Pak. Jokowi-Maruf terpilih sebagai Presiden RI. Kami dari partai Demokrat menghadirkan Calon Wakil Presiden Sandiaga uno di Kota Baubau ini proses meyakinkan pada masyarakat bahwa kami sangat serius dengan calon nomor 02 Prabowo subianto-Sandiaga uno. Kampanye yang kami jalankan sesuai dengan kebijakan DPP Partai Demokrat. Sejauh kontestasi politik di pemilu serentak 2019. Kader kami mengikuti seluruh kebijakan partai Demokrat, Kemudian para caleg dari partai Demokrat tidak ada satupun yang mendapat sanksi khususnya pemilu serentak 2019. Kami juga memerintahkan agar bisa berkampanye sesuai dengan dapil mereka masing-masing. Artinya bahwa mereka bisa berkampanye diri mereka sebagai caleg, maupun calon pilpres.

b. Partai Gerindra

Pemilu serentak 2019 sesuai dengan kebijakanDPP Gerindra untuk memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno. Hal paling mendasar adalah membentuk struktur kepengurusan kemenangan untuk memenangkan pertarungan pilpres mulai dari Kabupaten/Kota, Kota Baubau. Hingga Kecamatan maupun Kelurahan. Ketika pembentukan struktur yang terarah semacam itu tugas pimpinan partai adalah memberikan Sosialisasi dari tingkat paling atas hingga tingkat yang paling bawah dalam hal memenangkan Prabowo- subianto dan Sandiaga uno.

Kami dari DPD Gerindra ada kredit point yang cukup

menguntungkan dalam proses pemilu serentak 2019. Sebab segala bentuk visi misi dalam pertarungan pilpres, publik bisa menerima itu dan secara tidak langsung pemilih itu diantarkan untuk memilih calon legislatif yang berada dari partai Gerindra jika dilihat Perolehan kursi untuk partai Gerindra tahun 2019 kami memperoleh 4 kursi di DPRD Provinsi dan 2 Kursi di DPRD Kota Baubau. Itu artinya ada kredit poin yang positif untuk partai kami yang sangat menguntungkan buat kami. DPD Gerindra kami melakukan rapat konsolidasi setiap bulan, tentunya melibatkan unsur pimpinan partai di Kabupaten/Kota sepanjang tahun akhir 2018 hingga 2019 kami melakukan rapat itu di akhir bulan. Didalamnya ada pengurus DPD Provinsi dan DPC Kota. Seiring berjalan waktunya kami selalu koordinasi sehingga ada hal-hal yang perlu kami capai dalam pilpres 2019. Jika menyangkut dengan hal berkampanye tergantung situasi dan kondisi di lapangan, Misalnya para caleg partai Gerindra yang bertempat tinggal di suatu lingkungan tertentu dengan basis pemilih adalah Jokowi sudah tentu mereka akan memiliki upaya untuk mempengaruhi yang lain untuk dapat memenangkan Calon Presiden yakni Prabowo subianto-Sandiaga uno. Namun masyarakat Kota Baubau cenderung kepada Capres 02 Prabowo subianto- Sandiaga uno. Sebab saya selaku sekretaris DPD Gerindra dan Juga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.

c. Partai PAN

Pemilu serentak 2019 sebelum kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP PAN ke daerah. Kami diundang rapat kerja nasional (Rakernas) dalam

rakernas tersebut kami mendengar kebijakan otoritas DPP PAN yang mengusung Prabowo subianto-Sandiaga uno. Secara AD/ART Partai PAN keputusan tertinggi adalah DPP PAN.

Menurut Kamil adi Karim, Pemilu serentak 2019 sebelum kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP PAN ke daerah, DPD PAN mengundang DPD PAN Untuk memberikan masukan serta pandangan secara umum untuk dibawa ke rakernas DPP PAN. Sebab yang diundang hanya DPD PAN. kemudian DPD PAN menyampaikan ke rapat kerja nasional (Rakernas) dalam rakernas tersebut, setiap DPD yang berada di Indonesia menyampaikan pandangan terkait pemilu 2019 dan mendengar kebijakan DPP PAN yang mengusung Prabowo subianto- Sandiaga uno. Secara AD/ART Partai PAN keputusan tertinggi adalah DPP PAN. Sehingga kami di daerah tinggal menjalankan tugas sebagaimana yang diputuskan oleh DPP PAN. Keputusan ini hukumnya wajib untuk dijalankan jika tidak dijalankan maka para kader akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dari DPP PAN juga bertemu dengan partai koalisi lainnya untuk memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno. Bahwa kami dari DPW PAN, DPD PAN, mengikuti apa yang diperintahkan oleh DPP PAN. Strategi kemenangan dan pemetaan wilayah diseluruh Indonesia itu juga dari DPP PAN, termasuk pemetaan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Kota Baubau.

4. Peluang dan Tantangan

Pemilu serentak 2019, partai politik bisa melaksanakan fungsi-

fungsinya secara lebih efisien. Waktu, tenaga dan biaya yang dibutuhkan oleh partai politik untuk kampanye menjadi lebih efisien karena dilakukan secara bersamaan. Koalisi dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden bisa dilakukan lebih awal. Partai politik, bahkan partai kecil sekalipun mempunyai peluang yang sama dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan capres dan cawapres yang populer dan bisa diterima oleh partai-partai yang lain merupakan cara untuk mendongkrak suara partai dan memenangkan pemilu. Sedangkan tantangannya, partai politik harus mampu menawarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang populer dan bisa diterima oleh partai-partai yang lain untuk memperoleh dukungan dari koalisi partai yang akan dibentuk. Setiap sistem pemilu membawa konsekuensi bagi partai politik, sehingga pemilu serentak menuntut partai politik menggunakan strategi yang berbeda dalam memenangkan pemilu.

Di Kota Baubau koalisi partai politik Jokowi-Maruf amin. Tantangannya adalah dapat meyakinkan masyarakat Kota Baubau tentang calon presiden dan calon wakil presiden. Sebab, pemilu serentak 2019. Hampir secara keseluruhan masyarakat Kota Baubau memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden 02. Prabowo subianto-Sandiaga uno. Dalam hal berkampanye atau sosialisasi capres maupun cawapres koalisi Jokowi-Maruf amin di Kota Baubau tidak serius dalam berkampanye. Dengan begitu koalisi partai politik Jokowi-Maruf amin hanya memperhitungkan suara mereka di parlemen. Sehingga makin berkurang simpatisan Partai politik untuk memilih calon Presiden dan Wakil presiden 01. Jokowi-Maruf Amin.

Di Kota Baubau khususnya koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. tantangannya di parlemen DPRD Kota Baubau. Sebab dari koalisi Prabowo-Sandiaga uno tidak dapat menduduki jabatan strategis di parlemen yang memiliki jabatan strategis hanya koalisi dari Jokowi-Maruf amin. Di sisi lain pada saat berkampanye koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno sangat aktif dalam berkampanye sampai pemilu serentak selesai. Dengan begitu simpatisan koalisi Prabowo-Sandiaga uno sangat banyak terutama di kalangan suara milineal. Sejauh pemilu serentak berjalan koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sangat taatdalam menjalankan kebijakan partai DPP pusat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, Maka dapat disimpulkan hal-hal sebagaiberikut.

1. Calon Anggota legislatif, Koalisi Partai Politik Jokowi-Maruf Amin. PKB, GOLKAR, NASDEM dalam Kampanye Pemilu Serentak 2019 di Kota Baubau. Calon Anggota legislatif dalam berkampanye pada pemilu serentak 2019. Koalisi Jokowi-Maruf tidak efektif dan belum sepenuhnya menjalankan garis kebijakan dari partai pusat hingga partai di daerah, Sebab para calon anggota legislatif dalam koalisi tersebut masi membedakan pemilu Presiden dan pemilu legislatif. Begitu pula dengan para pimpinan partai politik yang masi menghitung koalisi ini yang sangat menguntungkan adalah partai PDI. Dengan hal tersebut anggota calon legislatif pun tidak

terikat dalam koalisi partai yang mengusung Jokowi-Maruf. Calon Anggota legislatif dari partai koalisi tersebut, yaitu Nasdem dan Golkar memberikan sanksi tegas pada calon Anggota legislatif mereka, yang dalam pemilu serentak 2019 mengkampanyekan, calon anggota legislatif dari Partai lain. Maka, koalisi partai secara nasional belum tentu diikuti partai di daerah secara garis kebijakan. Begitu juga dengan Anggota legislatif dari partai koalisi, belum sepenuhnya terikat secara konstitusi partai.

2. Calon Anggota legislatif. Koalisi Partai Politik Prabowo subianto-Sandiaga uno. DEMOKRAT, GERINDRA, PAN. Dalam kampanye pemilu serentak 2019 di Kota Baubau. Calon Anggota legislatif dalam berkampanye pada pemilu serentak 2019. Koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. Sangat aktif dalam menjalankan kebijakan dari partai pusat maupun partai di daerah yang secara koalisi sangat aktif berkampanye untuk memenangkan Prabowo subianto-Sandiaga uno, dalam pemilu serentak 2019. Sebab koalisi tersebut, para Anggota calon legislatif berkampanye sesuai perintah partai yang mengusung Prabowo subianto-Sandiaga uno. dalam koalisi Prabowo subianto-Sandiaga uno. tidak ada satupun Calon anggota legislatif yang diberikan sanksi secara organisasi partai. Karena masing-masing dari partai koalisi tersebut mengontrol para calon Anggota legislatif mereka. Setelah itu, pemilu serentak 2019 berakhir, ada evaluasi di masing-masing koalisi partai Prabowo subianto-Sandiaga uno. untuk, melihat kader partai yang keluar dari garis kebijakan pada pemilu serentak 2019. Calon anggota legislatif, yang dalam partainya mengusung Prabowo subianto-Sandiaga

uno. sangat terikat dengan garis kebijakan partai pusat maupun garis kebijakan partai di daerah, setelah pemilu berakhir tidak ada sanksi dari partai koalisi Prabowo subianto- Sandiaga uno. yang diberikan pada calon Anggota legislatif pada pemiluserentak 2019.

2. Saran

Pemilu serentak 2019. Untuk warga negara yang berpartai, terutama Calon Anggota legislatif. pada setiap momentum politik, akan ada dimana para Anggota calon legislatif, berada dalam sebuah perintah atau secara Hierarki, berada dalam satu sistem yang diikat secara aturan formal. Untuk itu, pada pemilu serentak 2019. Secara koalisi di daerah juga mampu mengontrol para anggota calon legislatif secara tegas. Yang nantinya tidak merugikan secara internal partai. Calon anggota legislatif yang keluar dari garis kebijakan partai tentunya sangat merugikan bagi partai, sebab partai tidak bisa mengontrol secara para kader,maupun pengurus partai. Calon anggota legislatif juga harus mampu menaati aturan partai pusat maupun aturan partai di daerah. Hubungan para calon anggota legislatif dengan partai politik dalam pemilu serentak 2019. Bukan hanya Hubungan politik, Namun hubungan hukum yang diatur oleh aturan partai. Maka, hubungan tersebut memiliki nilai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul latif dan hasbi ali, 2011. *Politik hukum* Jakarta: Sinar Grafika.

Abdul Mukhti Fajar.2013. *Partai politik dalam perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Malang : Setara Press.

- Achmad ali, 2010. *Menguak teori hukum (Legal theory), teori peradilan (judicial prudence), termasuk interpretasi Undang-Undang (Legis prudence)*, Jakarta: Prenada media group.
- Adnan Topan Husodo.2009. “*Gunung Es Korupsi di Parlemen*”, Dalam *Jangan Bunuh KPK*, Jakarta: Gramedia.
- Afan Gaffar. 2000. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad suhelmi,2001. *Pemikiran politik bara* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anam Rifai Dkk,2000. *Demokrasi dan Kebijakan Publik*. Malang: Cet ke 2 Averroes Press.
- August Mellaz, *Pembiayaan Kampanye Pemilu 2019: Personal Vote dan Candidate-Centered Politics dalam bingkai pemilu serentak, serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019, perihal penyelenggaraan kampanye*. Ebook, Diterbitkan oleh, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Cetakan pertama, Desember 2019.
- Ahsanul minan, *Refleksi sistem dan praktek penegakan Hukum pemilu di Indonesia. Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Ebook, Diterbitkan oleh BAWASLU RI. (Badan Pengawas Pemilihan Umum). Cetakan Pertama, Desember 2019.
- Aditya Perdana, *Masalah dan tantangan penyelenggara pemilu serentak 2019, serial evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019, perihal para penyelenggara pemilu*. Ebook, Diterbitkan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) cetakan pertama Desember 2019
- Bagir manan. 2003. *Teori dan politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH. UII Press,
- Bestian Nainggolan, 2016. *Konsentrasi dan dekonsentrasi Kuasa: Partai politik Indonesia 1999-2019* .Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Cheppy Haricahyono. 1991. *Ilmu politik dan perspektifnya*. Yogyakarta; Cetakan kedua, Tiara wacana.
- David Held. 2004. *Demokrasi dan Tatanan Global: dari Negara Modern Hingga Negara Kosmopolitan*, Cetakan pertama, Penerjemah: Damanhuri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- David held. 2007. *Model Of Democracy*, cet-1, Alih bahasa, Abdul harus Jakarta: Akbar Tandjung Instut.
- Despan Heryansyah dkk,2018. *Refleksi Demokrasi Kontemporer Antara Harapan & Kenyataan*. Yogyakarta: kreasi total media.
- H. Alwi Wahyudi, 2012.*Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendra Nurtjahyo. 2008. *Filsafat Demokrasi*, Cetakan Kedua. Jakarta; PT Bumi Aksara.
- Hamdan Zoelva,2011. *Pemakzulan presiden di Indonesia*. Jakarta; Sinar grafika.
- Haryatmoko. 2003. *Etika politik dan kekuasaan*.Jakarta: Kompas.
- Ichlasul Amal.2012. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta; Tiara Wacana.
- Imam kabul. 2005. *Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia, Analisis Potensi dan Problem*.Yogyakarta: Kurnia Kalam.
- Jean Jaques Rousseau, 2007. *Du contract social.Perjanjian sosial*, Jakarta: Visimedia.
- J.L.Kriekhoff, 2014. *Pendulum Antinomi Hukum*. Yogyakarta: Genta publishing.
- Jazim Hamidi dan malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*.Jakarta: Prestasi pustka publisher.
- Khairul fahmi, 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi*. cetakan pertama.Jakarta: PT Raja grafindo persada.
- Kuswanto, 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik; Pengaturan penyederhanaan Partai Politik dalam demokrasi presidensial*.Malang: Setara press.
- Lucky sandra amalia. 2016. *Evaluasi Pemilihan Presiden langsung di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Mahfud MD, 2010. *Membangun politik hukum menegakkan konstitusi*, Jakarta: Rajawali pers.

- Mahfud MD, *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Study tentang interaksi politik dan kehidupan ketatanegaraan* (Jakarta: PT Rineka cipta. 2003)
- Mahfud MD, 1999. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. (Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud MD, 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mochtar Mas' oed, 1999. *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: cet kedua, Pustaka Pelajar.
- Miriam budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1972)
- Merphin panjaitan, *Logika Demokrasi Rakyat Mengendalikan Negara*, (Jakarta: Permata aksara, 2011)
- Montesquieu, *The spirit of laws, Dasar-dasar ilmu hukum dan ilmu politik*, penerjemah M. khoirul anam (Bandung: nusa media 1997)
- Maswadi Rauf dkk, *AIPI-Asosiasi Ilmu politik indonesia. Sistem Presidensial & sosok Presiden Ideal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2009)
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara hukum studi Tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum islam, implementasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, cetakan keempat, (Jakarta: kencana prenatal media Group 2010)
- Mada sukrajati, *Evaluasi Pelaksanaan Hak Politik Di Pemilu Serentak 2019, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Pelaksanaan Hak Politik*. Ebook, Diterbitkan oleh, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum)
- Mada Sukrajati Dan Aditya Perdana, 2018. *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*; Ebook, Diterbitkan, BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum, REPUBLIK INDONESIA) Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350. Cetakan pertama, Desember 2018.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* Edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Edisi pertama, (Jakarta: Fajar Interpretama mandiri, 2017)
- Noor MS bakry, *Pendidikan kewarganegaraan*, cetakan keempat (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2014)
- Peter Mahmud Masrzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan keenam, Jakarta: kencana prenada media group, 2010)
- Padmo wahjono, 1991. *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: IND HILL-Co.
- Philupus M. hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia sebuah study tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara* .Surabaya: PT. Bina ilmu, surabaya.
- Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Siti Hasanah, 2018. *Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia* . Yogyakarta; Genta publishing.
- Samuel P. Huntington, 1997. *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Penerjemah Asrilmarjohan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sulardi, *Menuju sistem pemerintahan murni* (malang: setara press, 2012)
- Satjipto Rahardjo, 1978. *Permasalahan hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satjipto Rahardjo, 1985. *Beberapa pemikiran tentang rancangan antar disiplin dalam pembinaan hukum nasional* Bandung: sinar baru,
- Sigit Pamungkas, 2011. *Partai Politik, Teori dan Praktik di Indonesia* Penerbit, Istitute for democarcy and welfarism. Yogyakarta.
- Umaruddin Masdar, 1999. *Membaca Pikiran Gusdur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Zainal Arifin Mochtar, 2018. *Menjerat korupsi Partai politik*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Arifin Mochtar Dan Saldi Isra, 2018. *Parlemen Dua Kamar*
Yogyakarta: Genta publishing.

2. Tesis

Ibnu Ubaidillah, *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik (Studi Terhadap Pasal 13 Huruf e Tentang kewajiban Partai Politik)*. Tesis disampaikan pada Program Studi Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 22 Maret 2017

Syukur, *Rekrutmen Politik oleh Partai politik Peserta Pemilu 2014 di Kabupaten Merangin menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik*. Yogyakarta, Agustus 2015

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI. PKPU Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

4. Jurnal/Hasil Riset/Media Online

Arya fernandes, *Politik identitas dalam Pemilu Serentak 2019: Proyeksi dan Efektivitas*, Jakarta; Centre for Strategic and International Studies 2018.

Ahmad sholikin, *Mahalnya ongkos politik dalam pemilu serentak 2019*. Jurnal Transformative, Vol. 5, Nomor 1, Mei 2019.

Agus dedi, *Analisis Pemilihan Umum Serentak*, Jurnal MODERAT, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2019. ISSN: 2622-691X

Arya budi, *"Membongkar Vote Player dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014"*. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, Vol 17. Nomor 1. Juli 2013.

- Efriza, *Penguatan sistem Presidensial dalam pemilu serentak 2019*.
Jurnal penelitian politik, Vol. 16, No. 1, Juni 2019
- Fauzi, *Komunikasi Politik Calon Legislatif Dalam Memengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Pekommas, Vol. 3 No 1, April 2018.
- Imam Yudhi Prasetya, *Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik*.
Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 Nomor. 1. 2011.
- Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme diindonesia* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006)
- Jimly Assiddiqie, *Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal konstitusi, Vol. 3, No. 4, Desember 2006
- Jimly Assiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi. Vol. 3 no. 4, Desember 2006.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, Nomor 3, Volume 16, Juli Tahun 2016.
- Mouliza K.D Sweinstani, *Pilihan sistem pemilu dan potret keterwakilan perempuan Lesson learned sistem pemilu serentak 2019*. Jurnal Bawaslu Vol.6 No. 1 2019.
- Nico Harjanto, Artikel. *Politik Kekerabatan dan institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*, Analisis CSIS, Vol. 40, No. 2, 2011:
- Ratniah Solihah, *Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019, Dalam Perpektif Politik*. Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan. Vol. 3, No. 1, 2018.
- Sri Hastuti Puspita sari, Zayanti mandasari dan Hary setya Nugraha, “*Urgensi perluasan permohonan pembubaran Partai politik di Indonesia*”, Jurnal Hukum ius Quia Iustum Fakultas, Universitas Islam Indonesia, Vol. 23 Issue 4 oktober, 2016.
- Saiman, *Reformasi dan peran partai politik dalam pembangunan Indonesia*. (Jurnal Government, Edisi 2, Agustus 2003)
- Lihat selengkapnya dalam Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses Dan Hasil Pembahasan*

1999-2002, Buku II, (Jakarta: Sekretariat jenderal kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2010)

Lihat study yang dilakukan oleh ICW, Ibrahim Z. Fahmy badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia* (Jakarta: yayasan tifa dan IC, 2010)

Hasil Perhitungan Yang Dilakukan Oleh Tim Dari Data Profil Anggota DPR-RI Periode 2014-2019 di Olah Dari data DPR-RI

Syamsudin Haris dkk, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai politik ideal di Indonesia. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.* (Jakarta: 2016)

<https://regional.kompas.com/read/2019/09/16/16551071/anggota-dprd-Baubau-dilantik-posisi-ketua-beralih-dari-pdi-p-ke-pkb?page=all>.

Di akses Pada hari kamis Tanggal, 28 mei 2020.